

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2019

Form. 1.

SKPD Pelaksana: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Urusan yang dilaksanakan:

1. Urusan Sosial
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Perencanaan

I. URUSAN SOSIAL

A. Jumlah Program sebanyak 11 program dan kegiatan sebanyak 38 kegiatan.

Rincian Program dan kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGK CAPAIAN
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+ 11)	13
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.150.000	254.366.276	0	0	412.516.276	156.250.000	105.091.946	0	0	408.230.947	98,96
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	33.480.000	0	0	33.480.000	0	31.521.295	0	0	21.766.069	94,15
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	67.150.000	22.814.900	0	0	88.060.000	65.250.000	22.810.000	0	0	88.060.000	97,88
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	91.000.000	5.473.757	0	0	96.473.590	91.000.000	5.473.590	0	0	96.473.590	99,99
4.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	32.829.795	0	0	32.829.795	0	32.819.086	0	0	32.819.086	99,97
5.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	12.500.801	0	0	12.500.801	0	12.450.795	0	0	12.450.795	99,60
6.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	8.517.023	0	0	8.517.023	0	8.516.545	0	0	8.516.545	99,99
7.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	0	7.680.000	0	0	7.680.000	0	7.320.000	0	0	7.320.000	95,31
8.	Kegiatan Penyediaan Makanan	0	21.720.000	0	0	21.720.000	0	12.964.500	0	0	12.964.500	100

LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGK CAPAIAN
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
	dan Minuman											
9.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	44.000.000	0	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0	44.000.000	100
10.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	65.350.000	0	0	65.350.000	0	65.350.000	0	0	65.350.000	99.47
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.000.000	0	176.615.000	78.450.000	333.065.000	78.000.000	0	167.256.196	78.174.090	294.021.709	93.95
1.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional				36.350.000	36.350.000	0	0	0	36.150.000	36.150.000	99.45
2.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	34.924.090	34.924.090	99.78
3.	Kegiatan Pengadaan Meubiler	0	0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000	100
4.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	37.300.000	0	37.300.000	0	0	37.295.000	0	37.295.000	99.99
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	78.000.000	0	131.865.000	0	209.865.000	78.000.000	0	129.216.696	0	207.216.696	98,74
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	7.450.000	0	7.450.000	0	0	7.449.500	0	7.449.500	99.99
III.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	27.600.000	627.655.191	0	0	655.255.191	24.000.000	619.173.797	0	0	643.173.797	98.11
1.	Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	6.000.000	59.933.191	0	0	65.933.191	6.000.000	59.739.946	0	0	65.739.946	99.71
2.	Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan	6.000.000	45.815.000	0	0	51.815.000	4.500.000	41.886.300	0	0	46.386.300	89.52
3.	Kegiatan Pengembangan SLRT	15.600.000	503.070.000	0	0	518.670.000	13.500.000	499.594.551	0	0	513.094.551	98.93

LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGK* CAPAIA
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHAR AAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAA N	BELANJA MODAL	TOTAL	
	Kabupaten Pesisir Selatan											
4.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data PBI APBD/APBN	0	18.837.000	0	0	18.837.000	0	17.953.000	0	0	17.953.000	95.31
IV.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	84.260.000	164.586.400	0	0	164.670.660	79.660.000	161.711.900	0	0	241.371.900	97.00
1.	Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	71.060.000	73.030.000	0	0	144.090.000	66.460.000	72.605.650	0	0	139.065.650	96.51
2.	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	6.000.000	46.459.600	0	0	52.459.600	6.000.000	45.635.800	0	0	51.635.800	98.43
3.	Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	7.200.000	45.096.800	0	0	52.296.800	7.200.000	43.470.450	0	0	50.670.450	96.89
V.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	700.000	109.760.000	0	0	110.460.000	550.000	107.590.750	0	0	108.140.750	97.90
1.	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	700.000	109.760.000	0	0	110.460.000	550.000	107.590.750	0	0	108.140.750	97.90
VI.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	66.000.000	51.336.800	0		117.336.800	66.000.000	50.175.600	0		116.175.600	99.01
1.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten	66.000.000	51.336.800	0		117.336.800	66.000.000	50.175.600	0		116.175.600	99.01
VII.	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	9.600.000	99.909.200	0	0	109.509.200	9.550.000	98.328.598	0	0	107.878.598	98.51
1.	Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	0	30.159.800	0	0	30.159.800	0	29.840.098	0	0	29.840.0980	98.94
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan dan	9.600.000	69.749.400	0	0	79.349.400	9.550.000	68.488.500	0	0	78.038.500	98.35

LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGK CAPAI
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHAR AAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAA N	BELANJA MODAL	TOTAL	
	Keperintisan											
	TOTAL	158.150.000	1.307.613.867	176.615.000	78.450.000	1.720.828.867	14.010.000	1.142.072.591	167.256.196	78.174.090	1.401.512.877	94,04

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi:

- Semua Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik.
- Sedangkan Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar 89,52 % dan semua kasus yang ada dapat diselesaikan dengan baik,

II. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. Jumlah Program sebanyak 4 program dan Kegiatan sebanyak 9 kegiatan.
Rincian Program dan kegiatan :

Kincian Program dan Kegiatan : ... dan Kegiatan sebanyak 9 kegiatan.												
NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
I	Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	0	96.556.509	0	0	96.556.509	0	95.339.759	0	0	95.339.759	69.91
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	67.060.000	0	0	67.060.000	0	65.918.250	0	0	65.918.250	98.30
2.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	0	29.496.509	0	0	29.496.509	0	29.421.509	0	0	29.421.509	99.75
II.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari	0	313.417.600	0	0	313.417.600	0	191.270.850	0	0	191.270.850	90.38
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten	0	49.757.600	0	0	49.757.600	0	44.970.100	0	0	44.970.100	90.38
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	0	69.685.000	0	0	69.685.000	0	68.164.450	0	0	68.164.450	97.82
3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	0	193.975.000	0	0	193.975.000	0	78.136.300	0	0	78.136.300	30.86
III.	Program Perlindungan Anak	15.000.000	94.914.900	0	0	109.914.900	14.400.000	94.454.775	0	0	108.854.775	99.04
1.	Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak	15.000.000	94.914.900	0	0	109.914.900	14.400.000	94.454.775		0	108.854.775	99.04
III.	Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan	12.000.000	124.427.700	0	0	136.427.700	12.000.000	122.986.200	0	0	134.986.200	98.94

L.PPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG									TINGKAT CAPAIAN (%)	
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL		TOTAL
	Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah											
1.	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	6.000.000	68.479.600	0	0	74.479.600	6.000.000	67.591.100	0	0	73.591.100	98.81
2.	Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	6.000.000	24.315.600	0	0	30.315.600	6.000.000	23.830.100	0	0	29.830.100	98.40
3.	Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah	0	31.632.500	0	0	31.632.500	0	31.565.000	0	0	31.565.000	99.79
	TOTAL	27.000.000	629.316.709	0	0	656.316.709	26.400.000	504.051.584	0	0	530.451.584	80,83

B. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi:

- Semua Progran dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik, kecuali untuk kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten dengan realisasi sebesar 30, 86% dikarenakan penundaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2020

2.	LETTI SILVIA H, SST, SS, M.Si NIP. 19810907 200501 2 005	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
4.	RITA SUSANDRA, S.Pi.M.Si NIP. 19740202 199703 2 003	Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	S	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	v
5.	HASWANDI, SH NIP. 19651008 198903 1 005	Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	v
6.	HARMEN SABRI, S.ST NIP. 19840502 200501 1 002	Kasi Rehabilitasi Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
7.	DAFRIZAL Y.,SS NIP. 19680708 199811 1 001	Kasi Pemberdayaan Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
8.	NOVRINI YANTI, S.Pd NIP. 19721121 199803 2 002	Kasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
9.	Drs. FARDIMAL NIP. 19630715 198603 1 007	Kasi Perlindungan Sosial, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	v
No.	Nama/NIP	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan terakhir						Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLTA	DIII	SI	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
10.	DELMY SURYA PUTRA,SE NIP. 19730122 200003 1 004	Kasi Bantuan dan Jaminan Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
11.	ROSMANIAR, SH NIP. 19670719 198702 2 001	Kasi Penanganan Fakir Miskin	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
12.	Drs. ERIZAL NIP. 19631110 199005 1 001	Staf	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-
13.	BETRIYENI, S.P NIP. 19691209 199003 2 001	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-

L.PPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020

14.	HARI SUBAGYA NIP. 19641209 198910 1 001	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
15.	HILDA RULFIZA NIP. 19671218 199212 2 001	Staf	S	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
16.	SYAFRIJEF. S.TP NIP. 19820621 201407 1 002	Staf	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
17.	RAMLIS NIP. 19641212 200604 1 005	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
18.	IRMA YENNI NIP. 19770715 200701 2 006	Staf	S	-	v	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	-	-
19.	RAYMON SAPUTRA NIP. 19781006 200701 1 004	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
20.	DENI RAHMAN, S.AP NIP. 19870821 201903 1 001	Staf	F	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
21.	WIDYA OKTRA, S.AP NIP. 19921019 201903 2 003	Staf	F	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
22.	MERRY ILDIWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	Staf	F	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
Total				-	5	-	14	3	12	10	-	3	14	5	-	1	1	9

II. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

PERLINDUNGAN ANAK:																		
No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir				Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)				
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLT A	DIII	SI	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	SYOFIANERI, SH NIP. 19660706 198803 2 003	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
2.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt NIP. 19731224 200801 2 006	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
3.	MARFEN ROSADI, ST NIP. 19720307 200801 1 010	Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
4.	YULIA NOFITA, SE NIP. 19781124 200701 2 004	Kasi Data dan Informasi	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
5.	ASWITA, S.ST NIP.19760912 200604 2 006	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
6.	ADMAI DEDI, ST, M.Si NIP. 19750516 200701 1 005	Staf	S	-	-	-	-	v	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
7.	RONY EFFENDY NIP. 19771011 200701 1 004	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
	Total			-	1	-	5	1	3	4	-	1	6	-	-	-	-	2

III. URUSAN PERENCANAAN

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir						Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLT A	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	HARTETI, SH NIP. 19730302 200701 2 012	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v	
2.	APRIYANI, SE NIP. 19760404 200701 2 008	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	
	Total			-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	

Painan, 3 Februari 2020
 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
 NIP. 19631116 198602 1 002

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak 0 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama ----- 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama ----- 3) Dst---	0 MOU	Tidak ada MOU dengan daerah lain
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 2 yang terdiri dari 1) Penghargaan Perempuan Inspiratif Terbaik II dari Provinsi Sumatera Barat kepada Ovi Sanggar Diana 16 Desember 2019 2) Penghargaan dari Provinsi Sumatera Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial Terbaik II kepada Yayasan Al Khasyaf Kabupaten Pesisir Selatan	2	Ada

Painan, 3 Februari 2020
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN

ZULFIAN ARIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

**FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : PESIR SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Sosial
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
3. Urusan Perencanaan

Diisi oleh Perangkat Daerah, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

3. Urusan Perencanaan												
No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Perencanaan	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
KEBUAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100 %	100 %	33 %	Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 (tujuh) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peningkatan Penguatan Kelembagaan LKKS Perempuan 2. SOP ttg Pelaksanaan Ziarah Perorangan, Ziarah Rombongan/Kelompok 3. SOP ttg Penemuan Bayi/Anak Tanpa Identitas Keluarga/Orang 4. SOP ttg Rekomendasi SIOP Pantli dan Orsos 5. SOP ttg Pengurusan Rekomendasi untuk BPJS 6. SOP ttg Perlindungan Sosial 7. SOP ttg Program Keluarga Harapan (PKH)	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 (tujuh) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan Anggaran Responsive Gender 2. SOP ttg Pelayanan P2TP2A 3. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu 4. SOP ttg Rapat Peringatan Hari Ibu 5. SOP ttg Pelatihan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan 6. SOP ttg Pembuatan Keputusan Bupati tentang Pokja 7. SOP ttg Pembuatan Regulasi Daerah terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 0 (nol) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg.....	Ada 7 SOP	Ada 7 SOP	Tidak Ada	Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 460/306/SK/DSP PrPA-PS/V/2017 tentang SOP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2017	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Perencanaan	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
						(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkangan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkangan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepengkangan, sebanyak 11 org. Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepengkangan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepengkangan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	100 %	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Tidak ada Pemisahan Dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi Jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Perencanaan	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7B)	(8A)	(8B)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi Jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 11	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Analisis Pelayanan Sosial	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	3 (tiga) orang	tidak ada	tidak ada	
			6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 22 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.789 personil	PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 7 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.789 personil	PNS yang menangani urusan (3) Perangkat Daerah , sebanyak 2 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.789 personil	0,33 %	0,01 %	0,03 %	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	45,45 %	0,25 %	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data						KET	
						Urusan Sosial	Urusan PPPA			Capaian Kinerja			
							(7A)	Urusan Perencanaan	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)			
5	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.216.740.645,- - Total Belanja APBD, sebesar ----	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 530.451.584,- - Total Belanja APBD, sebesar ----	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.990.000,- - Total Belanja APBD, sebesar ----	----- %	----- %	----- %	dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 78.174.090,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	1,50 %	0 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2019.	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 173.961.196,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.412.374.372,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.412.374.372,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.412.374.372,-	7,22 %	0 %	0 %	Mengacu LKD tahun 2019.	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 173.961.196,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.232.311.727,-	7,22 %	0 %	0 %	Mengacu APBD tahun 2019.	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan	Ada sebanyak 7 jenis	Ada sebanyak 7 jenis	Ada sebanyak 7 jenis	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Perencanaan	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
						(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat daerah	Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) yaitu Laporan Barang Milik Daerah yang terdiri dari: - Rekapitulasi Daftar Mutasi - KIR - KIB A, B, C, D - dll	Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tidak Ada Pemisahan Laporan Aset	Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tidak Ada Pemisahan Laporan Aset	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebanyak 106.877.139,- asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak 3.631.978.619,- asset.	Tidak Ada Pemisahan Asset OPD	Tidak Ada Pemisahan Asset OPD	0 %	0 %	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana Informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan (Sekretariat SLRT) 3. WA SLRT 4. Email SLRT: slrtpeisirselatan@gmail.com 5. WA TKSK 6. TKSK masing Kecamatan 7. Fasilitas masing Nagari 8. Mobil Dapur Umum 9. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan (P2TP2A Mande rubiah) 3. WA P2TP2A 4. Email P2TP2A: p2tp2_pessel@yahoo.com 5. Mobil Perlindungan Anak 6. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Mobil Pawal Pembangunan	Jumlah sebanyak 9 jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana Informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat daerah

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x 100 % Jumlah pekerja perempuan	4.497 = 65,81% 6.834	
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	152.203 153.219 = 99,34%	
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	169.467 349.372 = 48,51%	
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerah	8 buah	
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun.	3.537 5.577 = 63,43%	
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	33.609 65.091 = 51,64%	

Paingan, 3 Februari 2020
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN

ZULFIKA PRIYANTO.S.H.M.Si
NIP. 196411161986021002